

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Partai politik memainkan peran signifikan dalam upaya menghasilkan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan diharapkan juga mampu mewujudkan stabilitas perpolitikan. Menguatnya kecenderungan partai politik bersikap pragmatis mengakibatkan proses pendewasaan demokrasi menjadi semu. Hal ini menyebabkan yakni (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya oposisi; (4) hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) kuatnya kecenderungan partai bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ini, khususnya point ke kelima, jelas bertentangan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.

Perilaku partai yang pragmatis salah satunya dapat kita temukan saat partai politik menetapkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi orientasi dalam membentuk koalisi. Termasuk di Kota Bukittinggi partai politik dalam membentuk koalisi bertindak pragmatis. Nuansa prgamatis dianalisa melalui orientasi yang terdapat pada partai politik tersebut. Partai GERINDRA dan PKS merupakan partai pemenang yang bertindak pragmatis dalam membentuk koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020 mendatang yang diukur melalui orientasi yang terdapat pada kedua partai.

Setelah dianalisa, terdapat (5) lima variabel persamaan dan (1) variabel perbedaan orientasi partai GERINDRA dan PKS dalam membentuk koalisi. Adapun persamaan orientasi kedua partai adalah:

1. Orientasi Partai, Partai GERINDRA dan PKS dalam membentuk koalisi sama-sama berorientasikan *Office Seeking* (pencari jabatan) dan berorientasikan *Vote Seeking* (pencari suara). Kesamaan orientasi ini dianalisa dari perilaku dan sikap dasar partai GERINDRA dan PKS dalam membentuk koalisi.
2. Orientasi koalisi, Partai GERINDRA dan PKS dalam membentuk koalisi cenderung pragmatis. Dikarenakan kedua partai mengabaikan pertimbangan kesamaan ideologis dan platform partai dalam membentuk koalisi. Kemudian pragmatis partai GERINDRA dan PKS terlihat ketika kedua partai terbuka dengan partai apapun dalam membentuk koalisi.
3. Format koalisi, Partai GERINDRA dan PKS tidak membatasi jumlah partai yang akan bergabung dalam koalisi. Kedua partai relatif terbuka dengan partai lainnya. Sehingga ukuran atau jumlah partai yang bergabung diharapkan sebanyak mungkin agar dapat memperoleh suara mutlak. Kemudian didukung dengan wacana pembentukan koalisi gemuk “oversize coalition”.
4. Ideologi koalisi, Partai GERINDRA dan PKS dalam membentuk koalisi sama-sama tidak mementingkan kesamaan ideologi partai. Maka dapat disimpulkan bahwa koalisi yang akan terbentuk akan bercorak lintas ideologi. Partai yang berideologikan Nasionalis akan berkoalisi dengan partai yang berideologikan Islam.
5. Keterhubungan dengan pola koalisi Nasional, Pola koalisi yang telah terbentuk pada tingkat Nasional tidak menjadi alternatif utama bagi partai GERINDRA dan PKS dalam membentuk koalisi. Namun tetap menjadi referensi bagi kedua partai untuk membangun koalisi. Partai GERINDRA mengharapkan koalisi yang akan

terbentuk mengacu kepada nasional karena untuk kondisi perpolitikan di Kota Bukittinggi akan menguntungkan partai GERINDRA karena berkoalisi dengan PKS, Partai Demokrat dan PAN yang merupakan partai besar di parlemen Kota Bukittinggi. Begitu juga dengan partai PKS yang memiliki alasan sama dengan partai GERINDRA. Namun kedua partai akan menjalankan koalisi yang diinstruksikan oleh DPP.

Perbedaan orientasi partai GERINDRA dan PKS dalam membentuk koalisi, yaitu pengaruh DPP terhadap penentuan rekan koalisi. Partai GERINDRA ditingkat daerah dalam menentukan rekan koalisi harus berdasarkan keputusan DPP yang dikarenakan partai GERINDRA menerapkan sistem partai yang bersifat komando. DPC Partai GERINDRA hanya merekomendasikan kepada DPP. Kemudian DPP yang akan memutuskan dengan siapa DPC GERINDRA akan berkoalisi. Sedangkan mekanisme yang terdapat dalam internal PKS adalah jika PKS hanya dijadikan sebagai rekan koalisi cukup diputuskan oleh pengurus DPD PKS. Namun jika PKS memajukan kader internal partai untuk dicalonkan dan diharuskan untuk membentuk koalisi maka mekanisme yang berjalan adalah DPD PKS merekomendasikan kemudian DPP mengeluarkan putusan yang akan dilaksanakan oleh DPD PKS.

Berdasarkan persamaan orientasi yang dimiliki oleh partai GERINDRA dan PKS, kedua partai tersebut berpeluang untuk berkoalisi dalam pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020 mendatang. Melalui orientasi tersebut karakteristik koalisi yang akan terbentuk adalah koalisi yang tidak didasarkan pada pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan (*policy blind coalition*) dan meninggalkan koalisi yang berdasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasi (*policy*

based coaliton). Kemudian format koalisi yang akan terbentuk pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah koalisi “warna-warni” yaitu koalisi partai politik yang tidak berdasarkan pengelompokan baku ideologi tertentu.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian tentang orientasi Partai GERINDRA dan PKS dalam pembentukan koalisi pada pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi tahun 2020, melahirkan beberapa saran yang diajukan peneliti baik secara teoritik maupun secara praktis. Sebagai berikut;

1. Kajian terkait partai politik di tingkat lokal dalam menangkap fenomena pembentukan koalisi pada Pilkada perlu diperluas. Besarnya cakupan kajian koalisi dalam penelitian ini membuat peneliti melihat bagaimana pembentukan koalisi oleh partai politik di tidak terlepas dari orientasi yang dimiliki oleh partai politik. Hal ini terpatri dari munculnya dua partai pemenang di parlemen yang mengalami kondisi internal nyaris sama. Bahwa agenda setting yang dijalani oleh partai dan elit politik dalam melahirkan keputusan atau sikap partai tidak dilandaskan oleh ideologis partai. Karena pada prinsipnya, pembentukan koalisi oleh partai politik harus berlandaskan ideologi dan platform partai sebagai manifestasi kepentingan rakyat.
2. Kajian partai politik dalam penelitian ini justru membuktikan bahwa perlu adanya pembaharuan dan perubahan sikap/perilaku dalam berperan sebagai peserta politik. Kebebasan berperilaku yang sering kali mengabaikan kepentingan rakyat oleh partai politik memiliki efek samping terhadap pencerdasan politik bagi masyarakat. Hal ini penting diperhatikan ketika upaya kemajuan berdemokrasi masih menjadi harapan di setiap warga negara Indonesia.

3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya fokus mengurai pembentukan koalisi yang dilihat dari perspektif orientasi yang dimiliki oleh partai politik. Sedangkan perspektif elit politik, perspektif budaya politik, perspektif yuridis, belum menjadi fokus peneliti. Hal ini diupayakan agar perilaku partai politik terhadap pembentukan koalisi mampu ditangkap secara ilmiah dan komprehensif.
4. Partai politik terkhusus Partai GERINDRA dan PKS Kota Bukittinggi diharapkan konsisten terhadap landasan ideologis yang diterapkan. Kemudian partai GERINDRA dan PKS diharapkan mampu menjadi penyeimbang di ranah perpolitikan Kota Bukittinggi yang pada dasarnya memiliki perbedaan ideologi dan keterimaan ditengah masyarakat. Sudah saatnya partai politik melakukan pendewasaan secara internalisasi agar terwujudnya demokrasi yang ideal. Kemudian partai politik terkhusus partai GERINDRA dan PKS harus berpihak pada tujuan yang edukatif dalam konteks pilkada, yang kemudian memberikan pengaruh kepada pihak manapun yang berusaha mengkristalkan motif-motif oligarki.
5. Penelitian ini sekiranya menjadi acuan bagi seluruh Partai Politik di Indonesia untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat melalui perjuangan ideologis dan menghentikan sikap-sikap pragmatis.
6. Penelitian ini juga diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat di seluruh Indonesia agar dapat merespon situasi dan kondisi politik yang berkembang pada Pilkada di daerah. Peran masyarakat lokal perlu dirangsang bahwa sejatinya mereka yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan dalam menentukan pemimpin-pemimpin di daerah.